

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2020



**DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAMBI**

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telanaipura, Jambi Fax. (0741) - 62627

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Pemerintah atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan. Hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan untuk dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Tujuan umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelapor yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber dana.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan OPD serta hasil-hasil yang telah ditetapkan.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana OPD menandai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh OPD selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi OPD, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
- b. Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- d. Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Daerah;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
- l. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi.
- m. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 34);
- n. Surat Edaran Gubernur Jambi No. 300/5589/Keu Tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem, Kebijakan dan Prosedur Akuntansi dan Laporan Keuangan.

1.3. Sistematika Penulisan Atas Laporan Keuangan

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Atas Laporan Keuangan
- 1.4. Entitas
- 1.5. Kebijakan Konversi

Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

- 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.1.1. Kondisi Perekonomian
 - 2.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan

2.3. Pencapaian Target Kinerja

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Neraca
- 5.3. Laporan Operasional
- 5.4. Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI. Informasi Non Keuangan

- 6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas
- 6.2. Struktur Organisasi
- 6.3. Penggantian Manajemen Pemerintahan Dalam Tahun 2020
- 6.4. Informasi Lainnya

Bab VII. Penutup

LAMPIRAN

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

2.1.1. Kondisi Perekonomian

Sejalan dengan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah, kebijakan yang dilakukan dalam melanjutkan pembangunan sektor industri dan perdagangan di Provinsi Jambi yaitu :

1. Mendorong pertumbuhan industri kecil, menengah dan besar berbasis kompetensi daerah.
2. Pengembangan sentra-sentra produksi industri kecil di pedesaan.
3. Pertumbuhan kawasan industri wilayah timur Provinsi Jambi.
4. Mendorong pengembangan usaha perdagangan yang efisien, berdaya saing dan berorientasi pasar ekspor.
5. Penyederhanaan perizinan dalam pelayanan kepada pelaku usaha dibidang ekspor dan impor.
6. Mendukung pelaksanaan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat.
7. Mendorong peningkatan PAD Provinsi Jambi.

2.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Makro

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan. Kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi, Rencana Strategis Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016-2021 yang selanjutnya diuraikan dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja).

2.3. Pencapaian Target Kinerja

Pencapaian dan penyerapan realisasi anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang sumber pembiayaannya melalui APBD Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. SEKRETARIAT/RUTIN

A. Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini terdiri dari 10 kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- i. Penyediaan Makanan dan Minuman
- j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini terdiri dari 4 kegiatan yang dilaksanakan, yaitu:

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini terdiri dari 4 kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :

- a. Pembinaan Jasmani dan Rohani
- b. Peningkatan Kapasitas SDM Disperindag

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program initerdiridari5kegiatan yang dilaksanakanadalahsebagiaiberikut :

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Neraca Aset
- b. Penyusunan Laporan Pengelolaan Kepegawaian
- c. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
- d. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
- e. Pengembangan Sarana Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat

B. Realisasi Program dan Kegiatan

1. Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Program initerdiridari 10 kegiatan, masukan (input) berupa dana sebesar Rp.1.042.095.450,- dengancapaianrealisasikeuangansebesarRp.956.417.846,-atau 91,78% dan fisikkegiatan95,79%.

Adapunkegiatan-kegiatan yang dilaksanakanadalahsebagiaiberikut :

- a. PenyediaanJasa Surat Menyurat
Dana (input) yang dialokasikanuntukkegiataniniadalahsebesarRp.54.596.000,- dengancapaianrealisasikeuangansebesarRp.54.594.000,- atau100% dan fisikkegiatan100%. Keluaran (output) yang diperolehadalahtersedianya kegiatan pelayanan jasa surat menyurat sehingga memperlancar arus informasi kepada pihak lain.
- b. PenyediaanJasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Dana (input) yang dialokasikanuntukkegiataniniadalahsebesar Rp.326.250.000,-dengancapaianrealisasikeuangansebesar Rp.248.398.586,- atau76,14% dan fisikkegiatan86,56%.Keluaran (output) yang diperolehadalahtermanfaatkannya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebagai penunjangkelancaran sarana di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
- c. PenyediaanJasaAdministrasiKeuangan

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.133.312.800.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.133.310.800.000,- atau 100% dan fisik kegiatan 100%.

Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya pembayaran tenaga administrasi keuangan sehingga pelayanan administrasi keuangan berjalan lancar.

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.117.230.988, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.116.305.650,- atau 99,21% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah tersedianya jasa kebersihan kantor sehingga terjaga kebersihan dan kenyamanan kantor.

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.90.043.720,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.90.043.300,- atau 100% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah tersedianya alat tulis kantor sehingga kelancaran kegiatan organisasi tercapai.

f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.25.591.250,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.25.372.950,- atau 99,15% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah tersedianya barang cetak dan penggandaan sehingga kelancaran kegiatan organisasi/kantor tercapai.

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.17.626.550,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.15.094.600,- atau 85,64% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sehingga kelancaran sarana penerangan bangunan kantor tercapai.

h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 11.934.240,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.11.810.000,- atau 98,96% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan di perpustakaan sehingga meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur Dinas Perindag Provinsi Jambi.

i. Penyediaan Makanan dan Minuman

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.17.620.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.17.557.500,- atau 99,65% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah tersedianya makanan dan minuman peserta rapat/pertemuan sebagai penunjang kelancaran rapat/pertemuan.

j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.247.889.902,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.243.930.460,- atau 98,40% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sehingga terjalinnya sinergitas dan sinkronisasi tugas dengan pihak-pihak terkait.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan, masukan (input) berupa dana sebesar Rp.688.306.940,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.654.925.249 atau 95,15% dan fisik kegiatan 97,58%.

Adapun seluruh kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.248.992.575,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.244.750.000,- atau 98,30% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah jumlah pengadaan peralatan gedung kantor sehingga meningkatkan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.90.672.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.90.672.000,- atau 100% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah jumlah pemeliharaan gedung kantor sehingga dapat menjaga keandalan gedung kantor beserta

sarana dan prasarannya agar bangunan gedung selalu layak fungsi.

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.286.982.365,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.263.044.749,- atau 91,66% dan fisik kegiatan 94,21%.

Keluaran (output) yang diperoleh adalah jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional sehingga dapat digunakan secara optimal.

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.61.660.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.56.458.500,- atau 91,56% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah jumlah pemeliharaan mesin/peralatan kantor (elektronik) sehingga terpeliharanya peralatan elektronik yang dapat berfungsi secara optimal.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini terdiri dari 1 kegiatan, masukan (input) berupa dana sebesar Rp. 0,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.0,- atau 0% dan fisik kegiatan 0%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.107.250.000,- tetapi karena terjadi refocusing maka dana untuk kegiatan ini dialihkan dengan kegiatan lain sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian capaian realisasi keuangan sebesar Rp.0,- atau 0% dan

fisikkegiatan0%. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya terjadi Refocusing realokasi APBD Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan instruksi Gubernur Jambi Nomor : 2/INGUB/BAKEUDA/2020 Tentang Refocusing Realokasi Kegiatan dan Perhitungan Pergeseran mendahului Perubahan APBD Tahun 2020 Tanggal 21 April 2020.

4. Program PeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur

Program initerdiridari2kegiatan, masukan (input) berupa dana sebesar Rp. 94.150.000,-dengancapaianrealisasikeuangansebesar Rp.60.444.700,-atau64,20% dan fisikkegiatan70,82%. Adapunkegiatan yang dilaksanakanadalahsebagiberikut :

a. Pembinaan Jasmani dan Rohani

Dana (input) yang dialokasikanuntukkegiataniniadalahsebesar Rp.33.180.000,-dengancapaianrealisasikeuangansebesar Rp.30.600.000,- atau92,22% dan fisikkegiatan 100%. Keluaran(output) yang diperolehadalahterlaksananyakegiatansevenam pagi yang dapat menjaga kesegaran dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani seluruh Pegawai Dinas Peindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

b. PeningkatanKapasitas SDM Disperindag

Dana (input) yang dialokasikanuntukkegiataniniadalahsebesar Rp.60.970.000,-dengancapaianrealisasikeuangansebesar Rp.29.844.700,- atau48,95% dan fisikkegiatan 54,95%. Keluaran(output) yang diperolehadalah diikutinyakegiatankursus, pelatihan, sosialisasidan bimbingan teknis bagi aparatur sehingga meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur Dinas Perindag Provinsi Jambi.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini terdiri dari 5 kegiatan, masukan (input) berupa dana sebesar Rp. 281.013.500,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 264.332.388,- atau 94,06% dan fisik kegiatan 100%. Adapunkegiatan yang dilaksanakanadalahsebagiberikut :

a. Penyusunan Laporan Keuangan Neraca Aset

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.13.610.000,- dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp.13.460.000,- atau 98,90% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah tersusunnya Laporan Realisasi Keuangan dan Aset dan diikutinya bimtek/diklat yang berkaitan dengan keuangan dan aset sehingga memberikan kemudahan dalam pencarian dokumen keuangan dan aset Dinas Perindag Provinsi Jambi.

b. Penyusunan Laporan Pengelolaan Kepegawaian

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.39.295.000,- dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp.25.795.060,- atau 65,64% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah tersusunnya laporan pengelolaan kepegawaian dan diikutinya bimtek/diklat yang berkaitan dengan kepegawaian sehingga memberikan kemudahan dalam pencarian dokumen kepegawaian Dinas Perindag Provinsi Jambi.

c. Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.154.719.000,- dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp.151.934.188,- atau 98,20% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah tersusunnya rencana kerjanya rapat koordinasi program dan kegiatan tahunan sehingga terencana program dan kegiatan dinas sebagai acuan dalam melaksanakan tupoksi.

d. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.31.739.500,- dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp.31.607.590,- atau 99,58% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi program dan kegiatan sehingga termonitor dan terevaluasinya pelaksanaan

program dan kegiatan yang telah dilaksanakan terutama yang pelaksanaan kegiatannya di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

- e. Pengembangan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat.

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.41.650.000,- dengan

capaian realisasi keuangan sebesar Rp.41.535.550,- atau 99,73% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah terinformasinya data perkembangan dan kinerja industri dan perdagangan melalui web.

II. SEKTOR PERINDUSTRIAN

A. Program dan kegiatan

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program ini terdiri dari 6 (enam) kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- a. Kegiatan Promosi Industri Kecil Regional dan Lokal
- b. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Industri Kecil
- c. Kegiatan Perajin Unit Promosi Jambi
- d. Kegiatan Pengembangan Desain Kerajinan Berbasis Budaya Daerah
- e. Kegiatan Kualitas Mutu Aneka Produk Industri Kecil
- f. Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Perajin Rumah Tenun

2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi industri.

Program ini terdiri dari 1 kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Pelatihan Peningkatan Mutu Produk Industri Berbasis Teknologi.

3. Program Pengembangan Industri Agro dan Kimia

Program ini terdiri dari 4 kegiatan, adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pengawasan Teknis Pengembangan Industri Menengah dan Besar
- b. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Industri Menengah dan Besar
- c. Kegiatan Peningkatan SDM Industri Menengah dan Besar
- d. Kegiatan Partisipasi pada Pameran Industri Menengah dan Besar

4. Program Pengembangan Standarisasi Nasional

Program ini terdiri dari 3 kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Kelembagaan Standarisasi.
- b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Mutu Ekspor dan Impor
- c. Kegiatan Penambahan Peralatan dan Bahan Uji Serta Perawatan Laboratorium

B. Realisasi Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program ini terdiri dari 6 (Enam) kegiatan, masukan (input) berupa dana sebesar Rp. 1.661.308.100,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 1.550.959.895,- atau 93,36% dan fisik kegiatan 96,42%. Adapun seluruh kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Promosi Industri Kecil Regional dan Lokal

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 721.456.300,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 616.966.095,- atau 85,52% dan fisik kegiatan 91,77%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya kegiatan promosi produk industri kecil yang dapat diketahui oleh masyarakat umum.

b. Penguatan Kelembagaan Industri Kecil

Dana (input) yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 782.438.636,- tetapi karena terjadi refocusing maka dana untuk kegiatan ini dialihkan dengan kegiatan lain sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- atau 0% dan fisik kegiatan 0%. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Industri Kecil terjadi Refocusing realokasi APBD Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan instruksi Gubernur Jambi Nomor : 2/INGUB/BAKEUDA/2020 Tentang Refocusing Realokasi Kegiatan dan Perhitungan Pergeseran mendahului Perubahan APBD Tahun 2020 Tanggal 21 April 2020.

c. Pengembangan Perajin Unit Promosi Jambi

Dana (input) yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 387.566.800,- dengan capaian realisasi keuangan Rp. 385.898.900,- atau 99,57% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya pelatihan pewarnaan

alam atau soft sehingga meningkatnya daya saing desain busana Jambi.

d. Pengembangan Desain Kerajinan Berbasis Budaya Daerah

Dana (input) yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.150.193.000,- dengan capaian realisasi keuangan Rp.148.732.900,- atau 99,03% dan fisik kegiatan 100%.Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya pelatihan pewarnaan alam atau soft sehingga meningkatnya daya saing desain busana Jambi.

e. Peningkatan Kualitas Mutu Aneka Produk Industri Kecil

Dana (input) yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.168.720.000,- dengan capaian realisasi keuangan Rp. 165.990.000,- atau 98,38% dan fisik kegiatan 100%.Keluaran (output) adalah terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas mutu aneka produk industri kecil dengan meningkatkan pengetahuan IKM berupa pelatihan manajemen dan cara berproduksi yang berorientasi pasar sehingga pengetahuan kualitas mutu memiliki keragaman.

f. Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Perajin Rumah Tenun.

Dana (input) yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.233.372.000,- dengan capaian realisasi keuangan Rp. 233.372.000,- atau 100% dan fisik kegiatan 100%.Keluaran (output) adalah terlaksananya kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas perajin rumah tenun sehingga terwujudnya perajin industri kecil tenun yang mampu bersaing di pasar dan dapat memenuhi selera konsumen yang ada pada saat ini baik secara lokal, nasional maupun internasional.

2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan, masukan (input) dana untuk program ini adalah sebesar Rp.214.382.500,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.202.244.910,- atau 94,34% dengan fisik kegiatan 100%. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pelatihan Peningkatan Mutu Produk Industri Berbasis Teknologi

Dana (input) yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 214.382.500,- dengan pencapaian realisasi keuangan Rp. 202.244.910,- atau 94,34% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) adalah terlaksananya pelatihan untuk mendorong masyarakat petani dan pelaku usaha agar dapat merangsang pertumbuhan usaha dan investasi baru terkait dengan pengembangan komoditi industri agro yang ada di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi.

3. Program Pengembangan Industri Agro dan Kimia

Program ini terdiri dari 4 kegiatan, masukan (input) dana untuk program ini adalah sebesar Rp. 440.637.200,- dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp. 438.286.808 atau 99,47% dengan fisik kegiatan 100%. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

a. Pengawasan Teknis Pengembangan Industri Menengah dan Besar.

Masukan (input) dana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 135.473.100,- dengan pencapaian realisasi keuangan Rp. 133.208.900,- atau 98,33% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) adalah terlaksananya pengawasan AMDK (air minum dalam kemasan), pengawasan minyak goreng dan pengawasan kopi serta pengawasan mesin-mesin produksi, dari ketiga produk di atas guna menghasilkan kualitas air yang memenuhi standar dan layak untuk diminum, serta minyak goreng dan kopi menghasilkan produk yang terjamin mutu, keamanan dan higienitasnya.

b. Penguatan Kelembagaan Industri Menengah dan Besar

Masukan (input) dana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 259.854.380,- dengan pencapaian realisasi keuangan Rp. 259.831.808,- atau 99,99% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) adalah terlaksananya kegiatan penguatan kelembagaan industri menengah dan besar sehingga meningkatkan wawasan dan pengetahuan teknis pelaku usaha dalam peningkatan mutu produk berbasis teknologi/manajemen/ menumbuh kembangkan usaha industri.

c. Peningkatan SDM Industri Menengah dan Besar

Masukan (input) dana yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp.45.309.720,-dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.45.246.100,- atau 99,86% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah peningkatan SDM Industri Menengah dan Besar dilaksanakan dengan mengkaji informasi awal kebutuhan peningkatan kemampuan, keterampilan dan motivasi SDM.

d. Partisipasi pada Pameran Industri Menengah dan Besar

Masukan (input) dana yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp.108.395.560,-tetapi karena terjadi refocusing maka dana untuk kegiatan ini dialihkan dengan kegiatan lain sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian capaian realisasi keuangan sebesar Rp.0,- atau 0% dan fisik kegiatan 0%.. Kegiatan partisipasi pada pameran industri menengah dan besar terjadi Refocusing realokasi APBD Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan instruksi Gubernur Jambi Nomor : 2/INGUB/BAKEUDA/2020 Tentang Refocusing Realokasi Kegiatan dan Perhitungan Pergeseran mendahului Perubahan APBD Tahun 2020 Tanggal 21 April 2020.

4. Program Pengembangan Standarisasi Nasional

Program ini terdiri dari 3 kegiatan, masukan (input) dana untuk program ini adalah sebesar Rp.306.588.049,-dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.305.767.311,- atau 99,73%dengan fisik kegiatan 100%. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

a. Pengembangan Infrastruktur Kelembagaan Standarisasi

Masukan (input) dana yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp.48.266.071,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.48.208.071,- atau 99,88% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah periode pemeliharaan dan penggantian suku cadang alat laboratorium sehingga meningkatnya kemampuan laboratorium dalam melakukan kalibrasi dan pengujian.

b. Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Mutu Ekspor dan Impor

Masukan (input) dana yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp.106.856.200,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 106.165.650,- atau 99,35% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah periode peningkatan kapasitas laboratorium dengan terlaksananya pengambilan contoh barang SNI wajib di pasaran dan peningkatan akreditasi, kepercayaan pelanggan dan PAD dan konsumen terlindungi dari produk-produk non standar.

c. **Penambahan Peralatan dan Bahan Uji Serta Perawatan Laboratorium**

Masukan (input) dana yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp.151.465.778,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.151.393.590,- atau 99,95% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya kegiatan penambahan peralatan dan bahan uji serta perawatan laboratorium sehingga terpeliharanya alat-alat laboratorium sesuai standar yang ditetapkan secara internasional sehingga meningkatnya kemampuan laboratorium dalam melakukan pengujian dan kalibrasi dan meningkatnya pelayanan terhadap konsumen.

III. SEKTOR PERDAGANGAN

1. Perdagangan Dalam Negeri

A. Program dan Kegiatan

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Secara keseluruhan program ini bertujuan untuk melindungi konsumen sesuai dengan pelaksanaan UU. No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan terdiri dari :

- a. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa.
- b. Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- c. Kegiatan Monitoring Barang Yang Kadaluarsa di Pasaran.

- d. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
- e. Kegiatan Survey IKM Terhadap Perlindungan Konsumen.
- f. Kegiatan Identifikasi Tertib Niaga.

2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program ini bertujuan untuk mengefisienkan perdagangan dalam negeri sehingga antara produsen dengan konsumen sama-sama diuntungkan dan sama-sama terlindungi. Salah satu cara adalah dengan memperpendek distribusi atau memperlancar distribusi yang sudah ada.

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri terdiri dari:

- a. Kegiatan Pengembangan Pasar Lelang Daerah dan Sistem Resi Gudang
- b. Kegiatan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri
- c. Kegiatan Fasilitasi Pasar Murah
- d. Kegiatan Pendataan Sarana Perdagangan dan Pedagang Informal.
- e. Kegiatan Rantai Pasok dan Prognosa Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting Lainnya.

B. Realisasi Program dan Kegiatan

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program ini terdiri dari 6 (enam) kegiatan, masukan (input) berupa dana sebesar Rp.503.390.500,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.495.795.400,- atau 98,49% dan fisik kegiatan 100%. Adapun seluruh kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
Masukan (input) dari kegiatan ini adalah dana sebesar Rp.175.179.600,- dengan realisasi keuangan Rp.173.627.000,- atau 99,11% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa sehingga berkurangnya peredaran barang yang tidak ber-SNI dan barang strategis yang tidak memenuhi ketentuan.

b. Pengembangan dan Pembinaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Masukan (input) dari kegiatan ini adalah dana sebesar Rp.154.929.300,-dengan realisasi keuangan Rp.149.989.700,- atau 96,81% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya pembinaan dan terbentuknya BPSK di 3 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi sehingga terselesaikannya sengketa konsumen dan terbinanya BPSK di 3 Kabupaten/Kota.

c. Monitoring Barang yang Kadaluarsa di Pasaran

Masukan (input) dari kegiatan ini adalah dana sebesarRp. 24.985.000,- dengan realisasi keuangan Rp.23.993.000,-atau 96,03% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya pengawasan terhadap barang yang kadaluarsa di pasaran sehingga berkurangnya peredaran barang atau produk yang sudah kadaluarsa atau tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dan meningkatnya pemahaman pelaku usaha/pedagang tentang aturan dan ketentuan yang berlaku.

d. Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Masukan (input) dari kegiatan ini adalah dana sebesar Rp. 53.325.200,-dengan realisasi keuangan Rp.53.252.800,-atau 99,86% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah peningkatan pengetahuan, pendidikan dan kepedulian masyarakat tentang perlindungan konsumen dan kepastian hukum agar konsumen dan pelaku usaha mengerti hak dan kewajibannya.

e. Survey IKM Terhadap Perlindungan Konsumen

Masukan (input) dari kegiatan ini adalah dana sebesar Rp. 50.050.000,- tetapi karena terjadi refocusing maka dana untuk kegiatan ini dialihkan dengan kegiatan lain sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian capaian realisasi keuangan sebesar Rp.0,- atau 0% dan fisik kegiatan 0%. Kegiatan Survey IKM Terhadap Perlindungan Konsumen terkena Refocusing realokasi APBD Tahun Anggaran 2020 untuk penanganan covid-19, sesuai dengan Instruksi Gubernur

Jambi Nomor : 2/INGUB/BAKEUDA/2020 Tentang Refocusing Realokasi Kegiatan dan Perhitungan Pergeseran mendahului Perubahan APBD Tahun 2020 Tanggal 21 April 2020.

2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program ini terdiri dari 5 (Lima) kegiatan, masukan (input) berupa dana sebesar Rp. 563.621.101,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 539.938.153,- atau 95,80% dan fisik kegiatan 100%. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Pengembangan Pasar Lelang Daerah dan Sistem Resi Gudang
Masukan (input) dari kegiatan ini adalah dana sebesar Rp. 204.361.300,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 193.004.700,- atau 94,44% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah jumlah peserta sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang perdagangan dalam negeri dan jumlah peserta pelatihan pengawas/verifikator mutu karet di pasaran dan terlaksananya Pelatihan Peningkatan SDM dan Sosialisasi Peraturan dan kebijakan tentang pengawasan mutu boka.

b. Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri
Masukan (input) dari kegiatan ini adalah dana sebesar Rp. 81.259.045,- dengan realisasi keuangan Rp. 81.259.045,- atau 100% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya Promosi dan Sosialisasi penggunaan produk dalam negeri sehingga meningkatnya kecintaan atau penghargaan masyarakat terhadap produk dalam negeri.

c. Fasilitasi Pasar Murah
Masukan (input) dari kegiatan ini adalah dana sebesar Rp. 120.016.034,- dengan realisasi keuangan Rp. 109.437.140,- atau 91,19% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya kegiatan fasilitasi pasar murah di 11 Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi.

d. Pendataan Sarana Perdagangan dan Pedagang Informal.

Masukan (input) dari kegiatan ini adalah dana sebesar Rp.66.810.850,- dengan realisasi keuangan Rp.65.569.750,- atau 98,14% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah terlaksananya pendataan sarana perdagangan dan pedagang kecil informal sehingga tersedianya data sarana perdagangan dan data pedagang kecil informal di 11 Kab/Kota se-Provinsi Jambi.

e. Rantai Pasok dan Prognosa Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting Lainnya

Masukan (input) dari kegiatan ini adalah dana sebesar Rp. 91.173.872,- dengan realisasi keuangan Rp.90.667.500,- atau 99,44% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pengawasan terhadap stok bahan kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya di tingkat distributor dan pasar tradisional di Jambi sehingga tersedianya data stok bahan pokok dan bahan penting lainnya dan terpantaunya stok bahan pokok dan penyalurannya.

2. Perdagangan Luar Negeri

A. Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

Program ini merupakan ujung tombak dalam rangka peningkatan kinerja ekspor Provinsi Jambi. Kegiatan ini difokuskan kepada bimbingan/petunjuk dalam pengisian dokumen yang menjadi salah satu syarat untuk melakukan kegiatan ekspor.

Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Pameran Perdagangan Luar Negeri.
- b. Kegiatan Forum Koordinasi Peningkatan Kinerja Ekspor Daerah.

B. Realisasi Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan, masukan (input) berupa dana sebesar Rp.93.139.500,- dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp.82.163.400,- atau 88,22% dan fisik kegiatan 100%. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Pameran Perdagangan Luar Negeri

Masukan (input) dari kegiatan ini adalah dana sebesar Rp. 311.813.076,- tetapi karena terjadi refocusing maka dana untuk kegiatan ini dialihkan dengan kegiatan lain sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian capaian realisasi keuangan sebesar Rp.0,- atau 0% dan fisik kegiatan 0%. Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah kegiatan Pameran Perdagangan Luar Negeri terjadi Refocusing realokasi APBD Tahun Anggaran 2020 untuk penanganan covid-19, sesuai dengan Instruksi Gubernur Jambi Nomor : 2/INGUB/BAKEUDA/2020 Tentang Refocusing Realokasi Kegiatan dan Perhitungan Pergeseran mendahului Perubahan APBD Tahun 2020 Tanggal 21 April 2020.

b. Kegiatan Forum Koordinasi Peningkatan Kinerja Ekspor Daerah

Masukan (input) dari kegiatan ini adalah dana sebesar Rp.93.139.500,- dengan realisasi keuangan Rp.82.163.400,- atau 88,22% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Forum Koordinasi Peningkatan Kinerja Ekspor Daerah dan Forum Konsultasi UKM Calon Eksportir, sehingga meningkatnya pengetahuan dan kinerja para eksportir dan aparat perdagangan luar negeri.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja keuangan adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategis instansi pemerintah. Proses ini dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian dan sasaran.

Dengan adanya pengukuran kinerja ini, maka akan dapat diambil suatu tindakan yang diperlukan untuk mengevaluasi dan mengoreksi atas program/kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Untuk melakukan pengukuran kinerja, telah digunakan indikator kinerja sebagai berikut :

- 3.1.1. Indikator kinerja pada tingkat sasaran yang merupakan tolok ukur keberhasilan suatu sasaran tersebut agar dapat dicapai.
- 3.1.2. Indikator kinerja pada tingkat kegiatan yang terdiri atas :
 - a. Indikator input (masukan) yaitu segala sesuatu yang dapat dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar dapat menghasilkan output (keluaran)
 - b. Indikator output (keluaran) yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik.
 - c. Indikator outcome (hasil) yaitu sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada waktu tertentu secara langsung.
 - d. Indikator benefit (manfaat) yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari suatu kegiatan.

- e. Indikator impact (dampak) yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator yang berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator

kinerja, input, output, dan outcome antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasi kinerja yang dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja karena realisasi yang berbeda dengan rencana.

Sesuai dengan Tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, maka telah tersusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mempedomani arah dan kebijakan umum APBD yang merupakan hasil kesepakatan dengan DPRD Provinsi dengan diikuti program strategis dan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang. Dokumen tersebut merupakan acuan untuk penyusunan anggaran dari masing-masing unit kerja Pemerintah Provinsi yang disebut Rencana Kerja Anggaran SKPD(RKA-SKPD) yang akan dibahas lebih lanjut oleh panitia anggaran pemprov dan panitia anggaran DPRD Provinsi Jambi. Hasil pembahasan dari tim panitia anggaran dimaksud, maka disusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD).

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

3.2.1. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja.

Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang telah dilakukan, selanjutnya dapat dilakukan analisis terhadap berbagai permasalahan yang menghambat pencapaian kinerja tersebut.

3.2.2. Hambatan Dan Permasalahan

Selama tahun 2020 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi telah merumuskan sasaran-sasaran strategisnya. Keberhasilan atau kegagalan sasaran pada Dinas Perindustrian dan

perdagangan Provinsi Jambi pada umumnya tidak banyak mengalami kegagalan, dan hal tersebut dapat dilihat pada tingkat pencapaian setiap program yang telah dilaksanakan pada umumnya telah mencapai 94,27%.

Beberapa permasalahan dalam pencapaian visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi melalui program dan kegiatan Dinas perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran konsumen untuk melindungi haknya sebagai konsumen.
2. Rendahnya kesadaran pelaku usaha makanan untuk tidak menjual produk yang dapat membahayakan keselamatan konsumen.
3. Rendahnya kemampuan SDM IKM terutama dalam kaitannya dengan kemampuan menangkap peluang usaha dan pasar, kejelian memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia serta kemampuan mengikuti perkembangan dan menerapkan teknologi yang semakin efisien dan efektif.
4. Terbatasnya komoditi ekspor.
5. Terbatasnya kemampuan UKM dalam melakukan kegiatan ekspor.
6. Rendahnya daya saing produk ekspor.
7. Potensi industri belum tertata dengan optimal.
8. Penerapan SNI dalam rangka ekspor, impor maupun jaminan mutu produk yang beredar agar sesuai SNI belum berjalan optimal.
9. Fluktuasi harga sembako dipasar terutama dihari-hari besar keagamaan.
10. Ada beberapa kegiatan terjadi Refocusing realokasi APBD Tahun Anggaran 2020 untuk penanganan covid-19, sesuai dengan instruksi Gubernur Jambi Nomor : 2/INGUB/BAKEUDA/2020 Tentang Refocusing Realokasi Kegiatan dan Perhitungan Pergeseran mendahului Perubahan APBD Tahun 2020 Tanggal 21 April 2020.

Dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi kedepan, maka yang diperlukan antara lain :

1. Sosialisasi UU Perlindungan Konsumen dan penegakan hukum tentang UU Perlindungan Konsumen.
2. Peningkatan SDM IKM.
3. Ketersediaan bahan baku produksi.
4. Ketersediaan teknologi proses produksi.
5. Peran aktif tenaga fungsional industri.
6. Kerjasama dalam pembinaan usaha industri dengan semua stake holder.
7. Melaksanakan kegiatan Pelatihan Ekspor bagi IKM dan UMKM.
8. Peningkatan mutu komoditi ekspor.
9. Peningkatan SDM aparatur .
10. Keberadaan pasar lelang spot dan forward di tingkat desa.
11. Peningkatan peran UPTD BPSMB dalam rangka pengujian mutu dan penerapan SNI wajib.
12. Mengoptimalkan pengawasan dan koordinasi dengan BPOM Jambi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan barang beredar.
13. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan dana yang dialokasikan dan terjadwal ke daerah sasaran.

Disamping itu pula pada sisi administrasi pencapaian dan penyerapan realisasi kegiatan ada beberapa hal yang juga perlu untuk dilaksanakan antara lain :

- a. Pengaturan jadwal kegiatan, perlu disesuaikan antara jumlah kegiatan atau tingkat kesulitan dalam kegiatan tersebut dengan waktu dan dana yang tersedia, sehingga tidak ada kegiatan yang dipaksakan harus selesai atau tidak dapat terlaksana.
- b. Perlu percepatan persiapan kegiatan yaitu pengambilan langkah antisipasi yang cepat dan tepat, terutama dalam proses pengadministrasian sebelum masuk tahap pelaksanaan.

- c. Bahwa setiap pengelola kegiatan sebaiknya mengetahui dan memahami betul core dari suatu kegiatan baik input,output dan outcomenya dan perlu diberikan asistensi khusus, mengenai apa yang perlu dilakukan dan yang menjadi kewajiban.
- d. Bahwa perlu dijadwalkan khusus pertemuan baik secara berkala maupun insidentil dengan pengelola kegiatan, untuk mengevaluasi kinerja proyek setiap bulannya.
- e. Bahwa setiap kegiatan perlu dibuatkan laporannya, termasuk rapat/pertemuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
- f. Bahwa setiap bidang dan sekretariat sebaiknya membuat laporan semester dan laporan tahunan, untuk mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan, sehingga memudahkan menyusun laporan tahunan, laporan akuntabilitas dan penyusunan rencana kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
- g. Meningkatkan proyeksi (predictability) dan akuntabilitas (accountability).

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa Laporan Keuangan.

Sedangkan entitas akuntansi adalah satuan kerja pada perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan pos-pos Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mengacu pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada lampiran E tentang Akuntansi dan Pelaporan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran atas pos-pos yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mengacu pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada lampiran E tentang Akuntansi dan Pelaporan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan telah mengacu kepada dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Laporan Keuangan

5.1. Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KASDA. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) atau dengan kata lain Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.

5.1.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KASDA. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Bakeuda selaku Bendahara Umum Daerah atau dengan kata lain belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi periode 31 Desember 2020 Terdiri dari Realisasi Pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 183.938.000,- dan Realisasi Belanja

sebesar Rp. 18.093.814.618,22,- yang berupa Belanja Operasi sebesar Rp. 17.843.967.828,22,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 249.846.790,-.

5.2. Neraca

5.2.1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,

termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumberdaya alam seperti hutan, kekayaan didasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap dan Aset lainnya.

Pengukuran/Penilaian Aset :

1. Persediaan;

Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

- Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksir pada saat perolehan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

4. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak

langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan peralatan dan mesin tersebut.

5. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap dipakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

6. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

7. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebagai biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.

- Biaya yang dapat didistribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi :

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

5.2.2. Kewajiban

Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

5.2.3. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar dan ekuitas dana diinvestasikan.

Posisi keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang tercermin dalam Neraca periode 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Jumlah Aset sebesar Rp.5.535.185.841,53 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.71.243.700,00,- Aset tetap sebesar Rp.5.463.942.141,53 Dana Cadangan sebesar Rp. 0,- dan Aset lainnya sebesar Rp.0,-.

Jumlah Kewajiban sebesar (Rp.396.410.749,00) terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar (Rp. 396.410.749,00) dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp. 0.

Jumlah Ekuitas Dana sebesar Rp. 5.931.596.590,53.

❖ Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran :

A. Pendapatan

Realisasi Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah (Laboratorium UPTD BPSMB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selama periode tahun 2020 adalah sebesarRp.183.938.000,00,- terdapat penurunan target sebesar Rp.80.548.500,00,- dari target tahun 2019 yaitu sebesar Rp.264.486.500,00,-

B. Belanja

Realisasi Belanja

Secara garis besar, belanja terdiri dari dua bagian yakni belanja operasi dan belanja modal. Sesuai susunan APBD setelah perubahan, masing-masing bagian belanja tersebut diuraikan lebih lanjut ke dalam belanja operasi yang terdiri belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal aset tetap lainnya

Anggaran dan realisasi masing-masing pos belanja sesuai susunan APBD tersebut, ***disajikan dalam lampiran mengenai Laporan Realisasi Anggaran.***

Dalam catatan atas laporan keuangan ini, disajikan informasi rincian pos belanja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Belanja dilakukan dengan pertimbangan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. Belanja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jambi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja dapat dilihat dari Tabel-tabel berikut ini :

TABEL 1

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana

Uraian	Anggaran murni	Anggaran setelah perubahan	Realisasi belanja	Presentase
1	2	3	4	5=(4/3)x100%
APBD	10.780.213.836,-	5.888.632.840,-	5.551.276.042,-	94,27%
Pinjaman lain	-	-	-	-
Hibah	-	-	-	-
Rupiah murni				
Pendamping	-	-	-	-
PNBP	-	-	-	-
JUMLAH		5.888.632.840,-	5.551.276.042,-	94,27%

TABEL 2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja

NomorUrut	Uraian Jenis Belanja	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Belanja
1	2	3	4
1	Belanja	19.394.745.376,03,-	18.093.814.618,22,-
1.1	Belanja operasi	19.140.656.011,03,-	17.843.967.828,22,-
1.1.1	Belanja pegawai	13.506.112.536,03,-	12.542.538.576,22,-
1.1.2	Belanja barang dan jasa	5.634.543.475,00,-	5.301.429.252,00,-
1.2	Belanja modal	254.089.365,00,-	249.846.790,00,-
1.2.1	Belanja Peralatan dan mesin	254.089.365,00,-	249.846.790,00,-
1.2.2	Belanja bangunan dan Gedung	0,-	0,-
1.2.3	Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan	0,-	0,-
Jumlah		19.394.745.376,03,-	18.093.814.618,22,-

TABEL 3
Rincian Anggaran dan Realisai Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4
Belanja Pegawai	13.506.112.536,03	12.542.538.576,22	92,87
Belanja Gaji dan Tunjangan	8.436.657.876,57	7.624.245.722,22	90,37
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.163.851.718,37	5.794.510.500,00	94,01
Tunjangan Keluarga	627.626.701,17	571.023.352,00	90,98
Tunjangan Jabatan	261.147.614,00	230.080.000,00	88,10
Tunjangan Fungsional	287.955.977,22	88.400.000,00	30,70
Tunjangan Fungsional Umum	244.439.770,11	202.480.000,00	82,83
Tunjangan Beras	313.782.121,93	285.986.580,00	91,14

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	83.734.510,54	5.480.539,00	6,55
Pembulatan Gaji	95.377,41	72.100,00	75,59
Iuran Asuransi Kesehatan	398.995.730,22	398.995.730,22	100,00
Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	15.445.733,42	11.804.195,00	76,42
Belanja Jaminan Kematian	39.582.622,18	35.412.726,00	89,47
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	5.069.454.659,46	4.918.292.854,00	97,02
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	0,00	0,00	0,00

1) Belanja Tidak Langsung

Terdiri dari Belanja pegawai yang dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

2) Belanja Langsung

(1) Belanja Pegawai, dipergunakan untuk pembayaran honorarium PNS, honorarium Non PNS, uang lembur pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

(2) Belanja Barang dan Jasa, dipergunakan untuk biaya rutinitas perkantoran yang berkaitan dengan barang/jasa, seperti pembelian bahan pakai habis kantor, biaya jasa kantor, biaya perawatan kendaraan bermotor, biaya cetak dan penggandaan, biaya sewa rumah/gedung/gudang/parkir, biaya makan dan minuman, biaya pakaian dinas dan atributnya, biaya pakaian khusus hari-hari tertentu dan biaya perjalanan dinas yang dipergunakan untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, dimasukkan dalam kelompok ini.

(3) Belanja Modal, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bersifat investasi (menambah aset OPD) yang berkaitan dengan kebutuhan aparatur daerah secara langsung mendorong terwujudnya pencapaian visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Output *atas* belanja modal tersebut menghasilkan barang/jasa, dan menambah nilai aset serta ekuitas dan diinvestasikan yang tercatat dalam neraca OPD.

(4) Ringkasan anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa serta belanja modal yang dalam APBD Tahun 2020 dikelompokkan dalam belanja langsung adalah sebagai berikut :

TABEL 4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung

Belanja langsung	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4
Belanja Pegawai			
Honorarium PNS	259.551.800	246.451.800	94,95
Honorarium Non PNS	738.615.000	685.114.500	92,76
Uang Lembur	0	0	0
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	565.167.228	516.564.890	91,40
Belanja Bahan/Material	279.237.123	271.777.500	97,32
Belanja Jasa Kantor	528.571.040	434.381.586	82,18
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	103.344.520	97.788.349	94,62
Belanja Cetak Dan Penggandaan	162.277.450	162.057.050	99,86
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang Parkir	108.498.640	84.658.295	78,03
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	29.830.000	29.830.000	100,00
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	0	0	0
BelanjaMakan Dan Minum	425.130.000	373.748.500	87,91
Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	0	0	0
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas	1.760.811.153	1.728.714.953	98,18
BelanjaKursus, Pelatihan, Sosialisasi dan BimbinganTeknis PNS	4.500.000	4.500.000	100,00
BelanjaPemeliharaan	92.763.621	87.562.121	94,39
Belanja Jasa Konsultansi	4.800.000	4.800.000	100,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	224.150.000	218.450.000	97,46
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0	0	0
Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta	196.650.000	183.150.000	93,14
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0

Belanja Modal	248.992.575,00	244.750.000,00	98,30
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	9.400.000,00	9.050.000,00	96,28
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	172.850.000,00	172.470.000,00	99,78
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	43.834.363,00	41.025.000,00	93,59
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	6.881.952,00	6.725.000,00	97,72
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari Arsip Pejabat	10.306.296,00	10.005.000,00	97,08
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	5.719.964,00,-	5.096.790,00	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	5.096.790,00	5.096.790,00	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika	5.096.790,00	5.096.790,00	100,00

Tabel 5
Rincian Realisasi Belanja Modal

Kode Rekening	Uraian Belanja modal (BM)	Setelah Perubahan	Realisasi Belanja
1	2	3	4
1.3.1	BM Tanah	-	-
1.3.2	BM PERALATAN DAN MESIN		
1.3.3	BM ALAT BENGKEL & ALAT UKUR		
1.3.4	BM ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	243.272.611,00	239.275.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	9.400.000,00	9.050.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	172.850.000,00	172.470.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	43.834.363,00	41.025.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	6.881.952,00	6.725.000,00

	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	10.306.296,00	10.005.000,00
1.3.5	BM ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	5.719.964,00,-	5.096.790,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	5.719.964,00,-	5.096.790,00
1.3.6	BM ALAT LABORATORIUM	5.096.790,00	5.096.790,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika	5.096.790,00	5.096.790,00
1.3.7	BM KEAMANAN		
1.3.8	BM Gedung Dan Bangunan		
1.3.9	BM Jalan,Irigasi, Dan Instalasi	-	-
1.3.10	BM Aset Tetap Lainnya	-	-
1.3.11	BM Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-

a. Tanah

Jumlah nilaitanah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.0,- terdiri dari :

- Nilai tanah per 31 Desember 2019 Rp. 0,-
- Mutasi tahun 2020 Rp. 0,-

Nilai tanah per 31 Desember 2020 Rp. 0,-

Nilai tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,- merupakan total nilai tanah, terdiri dari :

- Tanah Rp. 0,-
- Jumlah Rp. 0,-

b. Peralatan dan Mesin

Jumlah nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp.16.366.085.585,32 terdiri dari :

- Nilai Peralatan & Mesin per 31-12- 2019 Rp. 16.118.735.585,32
- Mutasi tahun 2020 (bertambah) Rp. 244.750.000,00
- Mutasi tahun 2020 (bertambah) Rp. 2.600.000,00
- Mutasi tahun 2020 (berkurang/ dibawah Kapitalisasi) Rp. 5.096.790,00

Nilai Peralatan & Mesin per 31-12-2020 Rp. 16.366.085.585,32

c. Gedung dan Bangunan

Jumlah nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp.4.650.040.453,00 terdiri dari :

- Nilai Bangunan dan Gedung per 31-12-2019	Rp 4.650.040.453,00
- Mutasi tahun 2020	<u>Rp. 0,00</u>
Nilai Bangunan dan Gedung per 31-12-2020	Rp. 4.650.040.453,00

d. Jalan,Irigasi, dan Jaringan

Jumlah nilai jalan,irigasi dan jaringan per 31 Desember 2020 sebesarRp.129.212.000,- nihil tersebut :

- Nilai jalan,irigasi dan jaringan per 31-12-2019	Rp.129.212.000,00
- Mutasi tahun 2020	<u>Rp. 0,00</u>
Nilai jalan,irigasi dan jaringan per 31-12-2020	Rp.129.212.000,00

e. Aset Lain-lain

Jumlah nilai aset lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp.88.900.000,00 terdiri dari :

- Nilai aset lain-lain per 31-12-2019	Rp.88.900.000,00
- Mutasi tahun 2019	<u>Rp. 0,00</u>
Nilai aset lain-lain per 31-12-2020	Rp.88.900.000,00

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. Nihil merupakan jumlah keseluruhan biaya yang dibayarkan untuk perolehan aset tetap berupa jembatan, jalan dan bangunan gedung

❖ **Penjelasan Atas Pos-pos Neraca**

➤ Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,- merupakan saldo kas pada bendahara pengeluaran yang terdiri dari:

- Saldo kas di bendahara per 31-12-2019	Rp. 0,-
- Saldo kas di bendahara per 31-12-2020	Rp. 0,-

➤ Aset Tetap

Aset tetap adalah aset terwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Nilai aset tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp.21.172.338.038,32 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2
Daftar Aset Tetap

Nama Aset Tetap	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5
Tanah	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	16.118.735.585,32	252.446.790,00	5.096.790,00	16.366.085.585,32
Gedung dan Bangunan	4.650.040.453,00	-	-	4.650.040.453,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	129.212.000,00	-	-	129.212.000,00
Aset Lainnya	27.000.000,00	-	-	27.000.000,00
Jumlah	20.924.988.038,32	252.466.790,00	5.096.790,00	21.172.338.038,32

- Catatan :
- Adanya mutasi bertambah dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi pada akun peralatan dan mesin berupa thermogun 2 unit sebesar Rp.2.600.000,-
 - Adanya barang dibawah kapitalisasi ekstracountable akun peralatan dan mesin (alat-alat laboratorium) sebesar Rp. 5.096.790,-

- **Ekuitas Dana Lancar**
- Ekuitas Dana Lancar adalah kekayaan bersih Pemerintah yang merupakan selisih antara nilai aset lancar dengan kewajiban lancar/jangka pendek, yang terdiri atas :
- Cadangan Piutang Rp. 0,-
 - Cadangan Persediaan Rp. 4.872.500,-

5.3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto(nya)(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

5.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan pergerakan ekuitas Pemerintah Daerah. Laporan Perubahan Ekuitas disusun dengan menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Surplus/Defisit Laporan Operasional.

Laporan Perubahan Ekuitas pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jambi dapat dirinci sebagai berikut :

- 1. Ekuitas awal sebesar Rp. 6.906.293.344,11 (enam milyar sembilan ratus enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh empat koma sebelas rupiah) yang merupakan jumlah ekuitas tahun 2019.
- 2. Surplus / defisit LO sebesar (Rp. 18.882.206.581,85) (delapan belas milyar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam ribu lima ratus delapan puluh satu koma delapan puluh lima rupiah) merupakan selisih yang akan mengurangi jumlah ekuitas.
- 3. Koreksi Ekuitas penyesuaian aset tetap sebesar (Rp. 2.496.790,00) (dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) yang merupakan koreksi atas pembetulan terhadap kesalahan pencatatan akuntansi sehingga akun/pos yang disajikan sesuai dengan yang seharusnya.
- 4. Ekuitas Akhir merupakan selisih antara Ekuitas awal dengan surplus/defisit LO dan Koreksi ekuitas lainnya dengan rincian :
Ekuitas awal..... Rp.6.906.293.344,11
Defisit - LO(Rp.18.882.206.581,85)

Koreksi	(Rp. 41.814.789,95)	
	(Rp.18.924.021.371,80)	
Kewajiban	<u>Rp.17.909.876.618,22</u>	
		<u>(Rp.1.014.144.753,58)</u>
Ekuitas akhir.....		Rp. 5.892.148.590,53

❖ Informasi Tambahan dan Pengungkapan Lainnya

Catatan Atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama periode pelaporan seperti :

Terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan atau diserap yaitu:

1. Adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena Refocusing Realokasi Kegiatan dan Perhitungan Pergeseran mendahului Perubahan APBD Tahun 2020.
2. Adanya efisiensi dana dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB VI. INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi berdomisili di Jalan Letjen Suprpto Nomor 28 Telanaipura, Jambi, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016.

6.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 40 Tahun 2020, Susunan atau Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Subbag Umum dan Kepegawaian.
 - 2. Subbag Keuangan dan Aset.
 - 3. Subbag Program dan Pelaporan.
- c. Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah.
 - 2. Seksi Fasilitas Industri, Industri Hijau dan Standarisasi Industri.
 - 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Industri.
- d. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam.
 - 2. Seksi Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas dan Inovasi.

- 3. Seksi Kerjasama, Pengawasan dan Pengendalian.
- e. Bidang Pengembangan Perdagangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri.
 - 2. Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri.
 - 3. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN).
- f. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen.
 - 2. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa.
 - 3. Seksi Tertib Niaga.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) BPSMB terdiri dari :
 - 1. Subbag Tata Usaha
 - 2. Seksi Pengembangan JPK
 - 3. Seksi Pelayanan TPK
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

6.3. Penggantian Manajemen Pemerintahan Dalam Tahun 2020

Dalam Tahun 2020 terdapat penggantian manajemen pemerintahan yaitu pelantikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas pada tanggal 25 Februari 2020.

6.4. Informasi Lainnya

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan dan rincian tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa :

- Pada Laporan Realisasi Anggaran : Dari target pendapatan yang ditetapkan Tahun 2020 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terealisasi sebesar Rp.183.938.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) atau 183,94% dan pada sisi belanja dianggarkan sebesar Rp.19.394.745.376,03 (Sembilan belas milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma nol tiga rupiah) terealisasi sebesar Rp. 18.093.814.618,22 (delapan belas milyar sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus delapan belas koma dua puluh dua rupiah) atau 93,29% terdapat efisiensi anggaran sebesar 6,71% terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.
- Neraca :

Posisi Aset pada akhir tahun 2020 sebesar Rp. 5.535.185.841,53 (lima milyar lima ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh satu koma lima puluh tiga rupiah) bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp.6.931.403.344,11 (enam milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga ribu tiga ratus empat puluh empat koma sebelas rupiah)terdapat penurunan sebesar Rp. 1.396.217.502,58atau79,85%.

Selama Tahun 2020 terdapat Kewajiban sebesar 396.410.749,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) dan Ekuitas Dana sebesar Rp. 5.931.596.590,53 (lima milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima puluh tiga rupiah).

- Laporan Operasional (LO) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi adalah :

1. Pendapatan – LO sebesar Rp.183.938.000,00 yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO sebesar Rp. 183.938.000,00 yang berupa :
Pendapatan Retribusi Daerah - LO sebesar Rp. 183.938.000,00

2. Beban – LO sebesar Rp. 19.066.144.581,85

terdiri dari :

- a. Beban Pegawai - LO sebesar Rp. 12.129.438.506,22
- b. Beban Barang dan Jasa sebesar Rp.5.246.556.973,00
- c. Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp 1.690.149.102,63

Sehingga terdapat selisih atau Surplus/Defisit LO sebesar Rp. 18.882.206.581,85

Jambi, Februari 2021

PENGGUNA ANGGARAN,

H. SYAMSURIZAL, SE. M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19691003 199803 1 005

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan OPD yang dipimpinnya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca disertai Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) pada Lampiran E (Akuntansi dan Pelaporan). Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jambi, Februari 2021

PENGGUNA ANGGARAN,

H. SYAMSURIZAL, SE. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691003 199803 1 005

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jambi, Februari 2021
PENGGUNA ANGGARAN,

H. SYAMSURIZAL, SE. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691003 199803 1 005

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2020			REALISASI 2019
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	
1	PENDAPATAN	100.000.000,00	183.938.000,00	183,94	264.486.500.00
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	100.000.000,00	183.938.000,00	183,94	264.486.500.00
3	Pendapatan Retribusi Daerah	100.000.000,00	183.938.000,00	183,94	264.486.500.00
4	BELANJA	19.394.745.376,03	18.093.814.618,22	93,29	27.955.215.945,00
5	BELANJA OPERASI	19.140.656.011,03	17.843.967.828,22	93,23	23.979.337.145,00
6	Belanja Pegawai	13.506.112.536,03	12.542.538.576,22	92,87	14.418.209.784,00
7	Belanja Barang dan Jasa	5.634.543.475,00	5.301.429.252,00	94,09	9.561.127.361,00
8	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BELANJA MODAL	254.089.365,00	249.846.790,00	98,33	3.975.878.800,00
10	Belanja Peralatan Dan Mesin	254.089.365,00	249.846.790	98,33	3.628.989.800,00
11	Belanja Bangunan Dan Gedung	0,00	0,00	0,00	346.889.000,00
12	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(19.294.745.376,03)	(17.909.876.618,22)	92,82	(27.690.729.445,00)

Jambi, Februari 2021
PENGGUNA ANGGARAN,

H. SYAMSURIZAL, SE. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691003 199803 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban Pengguna Anggaran dan Barang pada OPD.

Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Anggaran Tahun 2020 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

a. Pendapatan

Pendapatan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.100.000.000,00 sedangkan realisasi pendapatan sebesar Rp. 183.938.000,00 sehingga persentase realisasi pendapatan sebesar 183,94%.

b. Belanja

Belanja pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 19.394.745.376,03 sedangkan realisasi belanja adalah sebesar Rp. 18.093.814.618,22 sehingga persentase realisasi belanja mencapai 93,29%.

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Tahun Anggaran 2020 yang di dalamnya mencakup Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah Aset per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 6.931.403.344,15 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 24.792.100,00 dan Aset Tetap sebesar Rp. 6.817.711.244,15 serta Aset Lainnya sebesar Rp. 88.900.000,00. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 25.110.000,00 sedangkan jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 6.906.293.344,15

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.

Dalam penyajian atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian Laporan Keuangan secara wajar.

Jambi, Februari 2021
PENGGUNA ANGGARAN,

H. SYAMSURIZAL, SE. M.Si.
Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	iv
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	v
NERACA.....	vi
LAPORAN OPERASIONAL	viii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xi
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan	1
1.3. Sistematika Penulisan Atas Laporan Keuangan	2
BAB II. EKONOMI MAKRO,KEBIJAKAN KEUANGAN DAN	
PENCAPAIAN TARGET KINERJA	4
2.1. Ekonomi Makro	4
2.1.1. Kondisi Perekonomian	4

2.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Makro	4
2.2. Kebijakan Keuangan	4
2.3. Pencapaian Target Kinerja	5
BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	23
BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	28
4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	28
4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	28
4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	28
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	28
BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	29
5.1. Laporan Realisasi Anggaran	29
5.2. Neraca	29
5.3. Laporan Operasional	41
5.4. Laporan Perubahan Ekuitas	42
BAB VI. INFORMASI NON KEUANGAN	44
6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas	44
6.2. Struktur Organisasi	44
6.3. Penggantian Manajemen Pemerintah Dalam Tahun 2020 .	45

6.4. Informasi Lainnya	45
BAB VII. PENUTUP.....	46
LAMPIRAN	



NERACA

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

Per 31 December 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan	: 3 . 07	Urusan Pilihan Perindustrian
Unit Organisasi	: 3 . 07 . 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi	: 3 . 07 . 01 . 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

URAIAN	2020	2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	71.243.700,00	24.792.100,00
JUMLAH ASET LANCAR	71.243.700,00	24.792.100,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Dana Bergulir dari Investasi Non Permanen		
Penyisihan Piutang Dana Bergulir dari Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Dana Bergulir	0,00	0,00
Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi Dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
JUMLAH Penyisihan Piutang Dana Bergulir dari Investasi Non Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	16.366.085.585,32	16.118.735.585,32
Gedung dan Bangunan	4.650.040.453,00	4.650.040.453,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	129.212.000,00	129.212.000,00
Aset Tetap Lainnya	27.000.000,00	27.000.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(15.708.395.896,79)	(14.107.276.794,21)
JUMLAH ASET TETAP	5.463.942.141,53	6.817.711.244,11
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 3 . 07 Urusan Pilihan Perindustrian Unit Organisasi : 3 . 07 . 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sub Unit Organisasi : 3 . 07 . 01 . 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
URAIAN	2020	2019
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	88.900.000,00	88.900.000,00
Akumulasi Amortisasi	0,00	0,00
akumulasi penyusutan aset lainnya	(88.900.000,00)	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	88.900.000,00
JUMLAH ASET	5.535.185.841,53	6.931.403.344,11
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Utang Kepada pihak ketiga	0,00	0,00
Utang Belanja	16.689.321,00	25.110.000,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	16.689.321,00	25.110.000,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	16.689.321,00	25.110.000,00
EKUITAS		
EKUITAS	5.518.496.520,53	6.906.293.344,11
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	5.535.185.841,53	6.931.403.344,11



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 07 Perindustrian
Unit Organisasi : 3 . 07 . 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3 . 07 . 01 . 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
1	PENDAPATAN	100.000.000,00	183.938.000,00	183,94	0,00
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	100.000.000,00	183.938.000,00	183,94	0,00
1 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah	100.000.000,00	183.938.000,00	183,94	0,00
2	BELANJA	19.394.745.376,03	18.093.814.618,22	93,29	0,00
2 . 1	BELANJA OPERASI	19.140.656.011,03	17.843.967.828,22	93,23	0,00
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	14.504.279.336,03	13.474.104.876,22	92,90	0,00
2 . 1 . 2	Belanja Barang	4.636.376.675,00	4.369.862.952,00	94,25	0,00
2 . 2	BELANJA MODAL	254.089.365,00	249.846.790,00	98,33	0,00
2 . 2 . 2	Belanja Peralatan dan Mesin	254.089.365,00	249.846.790,00	98,33	0,00
2 . 2 . 5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.294.745.376,03)	(17.909.876.618,22)	92,82	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(19.294.745.376,03)	(17.909.876.618,22)	92,82	0,00

Jambi, 31 Desember 2020

Pengguna Anggaran

ROSNIFA,SE,MM

NIP. 19661028 199403 2 008



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2020 DAN 2019

Urusan Pemerintahan : 3		Urusan Pilihan			
Bidang Pemerintahan : 3 . 07		Perindustrian			
Unit Organisasi : 3 . 07 . 01		Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Sub Unit Organisasi : 3 . 07 . 01 . 01		Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN - LO	183.938.000,00	264.486.500,00	(80.548.500,00)	(30,45)
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	183.938.000,00	264.486.500,00	(80.548.500,00)	(30,45)
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	183.938.000,00	264.486.500,00	(80.548.500,00)	(30,45)
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	19.390.145.873,85	24.960.300.032,68	(5.570.154.158,83)	(22,32)
9.1.1	Beban Pegawai - LO	12.542.538.576,22	14.418.209.784,00	(1.875.671.207,78)	(13,01)
9.1.2	Beban Persediaan	1.399.575.948,00	1.744.785.530,00	(345.209.582,00)	(19,79)
9.1.2	Beban Jasa	1.932.558.934,00	3.604.425.703,00	(1.671.866.769,00)	(46,38)
9.1.2	Beban Pemeliharaan	185.350.470,00	443.058.900,00	(257.708.430,00)	(58,17)
9.1.2	Beban Perjalanan Dinas	1.723.776.053,00	3.749.523.912,00	(2.025.747.859,00)	(54,03)
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.601.249.102,63	991.196.203,68	610.052.898,95	61,55

Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 07 Perindustrian
Unit Organisasi : 3 . 07 . 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3 . 07 . 01 . 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9 . 1 . 8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 9	Beban Lain-lain	5.096.790,00	9.100.000,00	(4.003.210,00)	(43,99)
9 . 2 . 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		(19.206.207.873,85)	(24.695.813.532,68)	5.489.605.658,83	(22,23)
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
8 . 4 . 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	39.448.000,00	(39.448.000,00)	(100,00)
8 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0,00	39.448.000,00	(39.448.000,00)	(100,00)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(19.206.207.873,85)	(24.656.365.532,68)	5.450.157.658,83	(22,10)
POS LUAR BIASA					
8 . 5 . 1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 4 . 1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO		(19.206.207.873,85)	(24.656.365.532,68)	5.450.157.658,83	(22,10)

Jambi, 31 Desember 2020

Pengguna Anggaran

ROSNIFA,SE,MM

NIP. 19661028 199403 2 008



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 3 . 07	Perindustrian
Unit Organisasi : 3 . 07 . 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3 . 07 . 01 . 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

URAIAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	6.906.293.344,11	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(19.206.207.873,85)	(24.656.365.532,68)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lancar	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	130.000,05	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lainnya	(88.900.000,00)	0,00
Koreksi Ekuitas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Perhitungan Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap	2.600.000,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penilaian Pencatatan Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Atas Beban Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Pengakuan atas Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Kewajiban	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Silpa Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Piutang Dana Bergulir dan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Investasi Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lain-lain	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	17.904.581.050,22	0,00
EKUITAS AKHIR	5.518.496.520,53	(24.656.365.532,68)

Jambi, 31 Desember 2020

Pengguna Anggaran

ROSNIFA,SE,MM

NIP. 19661028 199403 2 008